



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: PPh sektor hotel, restoran, kafe ditanggung pemerintah
Tanggal	: Rabu, 24 September 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

PPh Sektor Hotel, Restoran, Kafe Ditanggung Pemerintah

Pemerintah tengah meramu kebijakan perluasan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi sektor hotel, restoran, dan katering/kafe. Langkah ini disebut untuk memperkuat kebijakan sebelumnya, yang hanya menyasar sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Kebijakan ini pun mendapat respons beragam.

"Perluasan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah yang sekarang sudah berjalan di industri padat karya, untuk didorong juga ke perluasan sektor lain," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Keuangan Purbaya

Yudhi Sadewa di kantornya, Jumat (12/9/2025).

Pemerintah memastikan insentif ini akan digelontorkan

hingga akhir tahun, setelah pembahasan tuntas.

"Kita akan rapatkan dan total nilainya akan kita fix kan. Dan ini sampai akhir tahun, semua kita dorong sampai akhir tahun,"

tegas Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR Saleh

Partaonan Daulay mengapresiasi langkah Pemerintah ini.

Menurut dia, insentif PPh 21 DTP akan memperkuat daya beli

masarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

"Kalau dilanjutkan dengan baik, insentif ini akan memperbaiki

daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian," kata

Saleh kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (24/9/2025).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai insentif pajak ini bukti

keberpihakan nyata Pemerintah kepada mayoritas pekerja.

"Kita juga akan meningkatkan daya beli masyarakat," tegas

Mirah, Selasa (24/9/2025).

Untuk mengetahui pandangan lengkap dari Saleh Partaonan dan Mirah Sumirat mengenai kebijakan insentif PPh 21 DTP ini, berikut wawancaranya.

SALEH PARTAONAN DAULAY
Ketua Komisi VII DPR

Kalau Berjalan Baik, Bisa Memperbaiki Daya Beli



“
Perlu dicatat, penggunaan uang negara dalam kebijakan ini menjadi lebih terarah.

MIRAH SUMIRAT
Presiden ASPIRASI

Kesejahteraan Pegawai Harusnya Bisa Terjamin



“
Keringinan ini bukan hanya meringankan beban pekerja, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ada insentif PPh 21 DTP bagi karyawan di sektor hotel, restoran, dan katering. Bagaimana Anda menilai kebijakan ini?

Perlu dicatat, karyawan yang dilakukan Pemerintah. Ini adalah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah dalam memperbaiki daya beli masyarakat, terutama yang memengaruhi ke bawah. Karena itu, kebijakan ini harus didukung agar dampaknya bisa lebih luas bagi stabilitas ekonomi.

Sebenarnya, dampaknya kepada hotel, restoran, dan katering seperti apa?

Begini, saya ambil contoh hotel. Beberapa waktu lalu, hotel sempat mengeluh karena adanya kebijakan Pemerintah yang melarang rapat di hotel. Kalau larangan itu terus berlanjut, penghasilan hotel akan turun drastis.

Tingkat kunjungan berkurang, okupansi turun, dan akhirnya penghasilan turun. Banyak bahan-bahan kebutuhan rapat juga ikut terpangkas. Karena itu, subsidi pajak akan sangat merugikan.

Selain itu?

Perlu dicatat, penggunaan uang negara dalam kebijakan ini juga turun. Pemerintah menganggap anggaran untuk membeli pihak yang benar-benar membutuhkan, dari informasi yang saya baca, ang-

garan untuk insentif PPh 21 DTP ini diambil dari dana yang tidak terserap. Jadi, anggaran yang dipakai memang sudah tersedia dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Sebenarnya, dampaknya kepada hotel, restoran, dan katering seperti apa?

Begini, saya ambil contoh hotel. Beberapa waktu lalu, hotel sempat mengeluh karena adanya kebijakan Pemerintah yang melarang rapat di hotel. Kalau larangan itu terus berlanjut, penghasilan hotel akan turun drastis.

Tingkat kunjungan berkurang, okupansi turun, dan akhirnya penghasilan turun. Banyak bahan-bahan kebutuhan rapat juga ikut terpangkas. Karena itu, subsidi pajak akan sangat merugikan.

Lalu kalan untuk sektor restoran dan katering/kafe?

Saat ini, kondisi ekonomi memang masih terbatas pada sektor padat karya. Keringinan ini bukan hanya meringankan beban mereka. Dengan adanya insentif ini, beban mereka bisa berkurang. Harapannya, tentu bisanya berdampak pada daya beli masyarakat pada pelaku usaha masyarakat di sektor hotel, restoran, dan katering.

Artinya, secara tidak langsung ini akan meningkatkan daya beli bagi karyawan di sektor tersebut ya?

Ya, tentu. Dalam jual-beli ada beberapa faktor yang memengaruhi. Antara faktor itu barang, harga, tempat, bingka, packaging. Nah, salah satu yang paling berpengaruh langsung adalah harga. ■ NNM

Bagaimana Anda melihat kebijakan Pemerintah yang memperluas insentif PPh 21 DTP bagi pekerja sektor hotel, restoran, dan katering?

Kami menyambut baik langkah Pemerintah yang membebaskan pajak penghasilan bagi pekerja dengan upah Rp10 juta. Keringinan ini adalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia yang masih berada pada kelompok berpenghasilan tinggi serta perusahaan besar. Dengan begitu prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga.

Kebijakan ini memberi dampak apa bagi pekerja?

Tentunya ya. Keringinan ini bukan hanya meringankan beban pekerja, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Konkretnya seperti apa?

Dengan penghasilan yang lebih utuh dibawa pulang, pekerja dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan keluarga.

Anda yakini kebijakan ini bisa memperkuat perekonomian nasional?

Ketika daya beli pekerja meningkat, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian Indonesia akan turun. Konsumsi yang meningkat mendorong produksi. Kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin akan membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, apa yang perlu dilakukan Pemerintah?

Pemerintah harus serius mengupayakan pajak yang adil dan jujur, sekaligus memperbaiki basis pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi serta perusahaan besar. Dengan begitu prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga.

Kedepan, sikap ASPIRASI terhadap kebijakan ini bagaimana?

Kami akan terus mengajak agar harga barang dan makanan tidak terlalu mahal bagi pekerja sekaligus menjadikannya instrumen memperkuat keadilan sosial di Indonesia. ■ NNM